Merosotnya jumlah petani berpotensi menghambat swasembada pangan dan menimbulkan krisis pangan yang lebih parah. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian dan menjamin kesejahteraan produsen pangan atau petani.

ALI MUTASOWIFIN
Dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

SDM Pertanian dan Mimpi Swasembada

Saat bertemu dengan para gubernur dari seluruh Indonesia belum lama ini, Presiden Joko Widodo mencanangkan target swasembada beras, kedelai dan jagung selama tiga tahun pertama masa pemerintahannya.

Dua tahun berikutnya diupayakan swasembada gula dan daging. Semua ini bisa diwujudkan, janjinya, bila pemerintah berani mengurangi subsidi BBM sehingga dapat mengalihkannya pada sektor-sektor lain yang lebih produktif.

Beberapa langkah telah direncanakan untuk mewujudkan tekad itu. Dalam kunjungannya di kawasan pertanian Bogor sebelum deklarasi calon presiden, Jokowi pernah mengutarakan gagasannya, yakni pengamanan lahan pertanian agar tak dikonversi, pembangunan infrastruktur dan teknologi pertanian, pendampingan kepada para petani, serta pendirian bank pertanian.

Sayang, tampaknya dia alpa menyebutkan pentingnya membenahi masalah sumber daya manusia (SDM) pertanian, yang merupakan salah satu kunci penting untuk mencapai swasembada pangan.

SUMBER DAYA PERTANIAN

Mustahil membayangkan kita akan mampu mencapai swasembada pangan tanpa didukung sumber daya pertanian yang memadai. Sayangnya, minat warga Indonesia untuk menjadi petani terus menunjukkan penurunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Sensus Pertanian 2013 mencatat jumlah rumah tangga petani (RTP) pada 2013 adalah 26,14 juta atau turun 5,10 juta dari 2003 yang mencapai 31,23 juta rumah tangga.

Hasil tersebut menunjukkan terjadi penurunan jumlah rumah tangga pertanian rata-rata sebesar 1,77% atau sekitar 500.000 rumah tangga per tahun. Berkurangnya jumlah rumah tangga pertanian itu disebabkan turunnya jumlah petani gurem, yaitu petani yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektare.

Jumlah petani gurem pada 2013 sebesar 14,25 juta rumah tangga, turun 4,22 juta dibandingkan Sensus 2003 sebanyak 19,02 juta rumah tangga.

Jumlah petani gurem berkurang karena lahan mereka beralih fungsi seperti dijual oleh pemilik, disewakan, ataupun karena para petani gurem tersebut beralih profesi.

Maka tidaklah mengherankan jika tidak banyak orang tertarik menjadi petani karena pendapatannya yang sangat rendah. Menurut data terbaru BPS, total pendapatan petani Rp 12,5 juta/tahun/RTP, atau hanya sekitar Rp 1 juta/bulan/RTP, jauh di bawah upah minimum yang berlaku saat ini.

Gambaran muram kehidupan petani Indonesia juga terlihat dari data bahwa 63,25% dari 28,60 juta jiwa penduduk miskin Indonesia adalah petani dan buruh tani.

Suramnya masa depan di bidang pertanian ini membuat anak-anak petani enggan terjun mengikuti jejak orang tuanya, sehingga regenerasi petani tidak berjalan. Para petani pun melarang anaknya bekerja di sektor pertanian.

Mereka justru lebih suka anaknya sukses menjadi pegawai negeri, pegawai swasta, pengusaha, atau bahkan menjadi tenaga kerja di luar negeri.

Mandeknya regenerasi petani juga dibarengi rendahnya kualitas SDM pertanian. Sebagian besar SDM pertanian saat ini adalah golongan tua, berusia di atas 45 tahun yang 70% di antaranya berpendidikan rendah atau di bawah sekolah dasar (SD).

Banyak lulusan sekolah menengah atas (SMA) tidak tertarik melanjutkan studi di bidang pertanian. Akibatnya, pendaftar fakultas pertanian di beberapa perguruan tinggi cenderung menurun, bahkan seleksi penerimaan mahasiswa baru setiap tahun sering menyisakan banyak bangku kosong.

Di beberapa perguruan tinggi berbasiskan pertanian seperti IPB, program studi-program studi "ekstra" seperti ekonomi, manajemen, atau komputer lebih diminati calon mahasiswa daripada bidang ilmu pertanian yang justru menjadi ciri khasnya sejak berdiri.

Mereka yang lulus dari fakultas pertanian pun kemudian lebih memilih bekerja di luar bidang pertanian. Padahal, kualitas SDM pertanian inilah yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi produktivitas sektor pertanian.

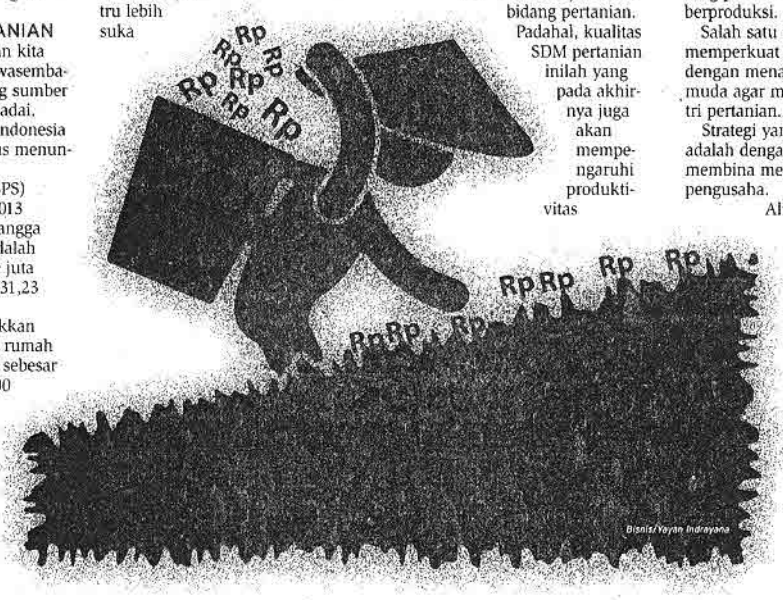

PERTANIAN PILIHAN

Merosotnya jumlah petani berpotensi menghambat swasembada dan menimbulkan krisis pangan yang lebih parah.

Untuk itu, selain memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian sebagaimana telah sering dijanjikan, pemerintah juga perlu menjamin kesejahteraan produsen pangan atau petani, sehingga orang kembali tertarik menggeluti industri pertanian.

Sebagian besar petani kita menjadi petani karena tidak ada pilihan yang lebih baik dan merupakan warisan turun-temurun.

Untuk itu, masyarakat perlu ditunjukkan jaminan bahwa jika bekerja sebagai petani, maka nilai dan kualitas kehidupan mereka akan lebih baik dari sekarang. Jaminan tersebut meliputi kelangsungan hidup keluarga petani di masa depan.

Beragam kebijakan untuk mendukung itu, misalnya pemerintah menyediakan asuransi pertanian, sehingga ketika terjadi bencana atau iklim ekstrem, petani dijamin tidak menderita kerugian.

Petani juga perlu diberi kesempatan memperoleh kredit perbankan dengan bunga rendah serta syarat dan prosedur yang tidak berbelit.

Sejauh ini akses petani kepada lembaga keuangan masih terbatas, terlebih para petani gurem yang memiliki lahan sempit. Pemerintah perlu pula menjamin harga hasil pertanian sehingga mampu mendorong petani menjadi lebih bergairah berproduksi.

Salah satu langkah strategis memperkuat SDM pertanian adalah dengan menarik minat generasi muda agar mau berkiprah di industri pertanian.

Strategi yang dapat diterapkan adalah dengan mendorong dan membina mereka menjadi petani pengusaha.

Alih-alih hanya berkutat dengan urusan tanam-menanam di sawah yang hanya sedikit memperoleh nilai tambah, petani pengusaha mengusahakan pertanian mulai dari membuka lahan hingga pascapanen.

Dengan juga memasarkan produk pertanian yang dihasilkan, mereka akan berkesempatan memperoleh bagian nilai tambah yang lebih banyak.